BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pasca perang Dunia II, Jepang telah menekankan kawasan Asia sebagai salah satu fokus dari kebijakan diplomatik khususnya kawasan Asia Tenggara. Hingga saat ini, Jepang telah banyak bekerjasama dengan negara-negara yang berada dikawasan Asia Tenggara seperti kerjasama dalam bidang ekonomi. Sebagaimana Jepang merupakan mitra ekonomi terbesar di kawasan ini. Selain itu, Jepang juga aktif dalam memberikan bantuan bagi proses pembangunan negara-negara berkembang.

Dalam melaksanakan berbagai kerjasama dengan memanfaatkan dana dan teknologi yang dimiliki, pemerintah Jepang merumuskannya dalam kerangka Bantuan Pembangunan Resmi atau dikenal dengan *Official Development Assistance* (ODA). ODA merupakan komitmen pemerintah Jepang yang bersifat global dalam memberikan bantuan luar negerinya terhadap negara-negara berkembang. Pada awal kemunculannya, pinjaman ODA dinilai hanya akan menguntungkan pihak Jepang saja. Isu inilah yang dinilai dapat menjadi tantangan bagi Jepang dalam memberikan bantuannya. Ditengah persaingan global dalam memberikan bantuan dengan Amerika Serikat, Jepang terus memperbaiki citranya dengan menunjukkan perhatian yang lebih baik terhadap negara-negara berkembang dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih serta peningkatan kesejahteraan masyarakat bagi negara-negara tersebut.

Dalam pelaksanaannya, ODA Jepang memiliki beberapa bentuk kerjasama baik melalui institusi pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Organisasi Internasional. Selanjutnya berdasarkan penyaluran bantuannya, ODA Jepang terbagi ke dalam dua bentuk kerjasama yaitu dalam bentuk bantuan bilateral dan bantuan multilateral. Bantuan Multilateral diberikan melalui organisasi internasional salah satunya ialah penyaluran bantuan melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Sedangkan untuk bantuan bilateral diberikan langsung kepada negara-negara berkembang, dengan maksud untuk memberikan kontribusi dalam membina hubungan Jepang dengan masing-masing negara berkembnag melalui bantuan yang dirancang berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Selanjutnya, bantuan Bilateral kemudian terbagi kedalam 3 kategori yaitu Bantuan Hibah, Kerjasama Teknik, dan Pinjaman ODA.

Semua bantuan tersebut disalurkan oleh suatu lembaga kerjasama yang disebut *Japan International Cooperation Agency* (JICA). JICA telah banyak memberikan bantuannya ke beberapa negara baik negara diluar dikawasan Asia ataupun negara yang berada di kawasan Asia dan salah satunya ialah Indonesia.

Kerjasama bilateral yang dibangun oleh Jepang dengan Indonesia telah terjalin sejak tahun 1954 jauh sebelum dibentuknya JICA yaitu dengan adanya program pelatihan di Jepang dan penugasan tenaga ahli Jepang di Indonesia. Hingga pada tahun 1958 dimulainya pemberian bantuan dalam bentuk pampasan perang dengan tujuan membantu pembangunan Indonesia usai dijajah. Komitmen Jepang dalam membantu pembangunan di Indonesia sejak awal di fokuskan dalam

membantu peningkatan perekonomian seperti dibentuknya dana kerjasama ekonomi luar negeri yang merupakan pengembangan dari dana kerjasama pembangunan Asia Tenggara. Selanjutnya dibentuklah Badan Kerjasama Teknik Luar Negeri yang kemudian berubah menjadi Badan Kerjasama Internasional Jepang atau *Japan International Cooperation Agency* (JICA) (Bulletin JICA di Indonesia 2008: 21).

Kerjasama yang dibangun oleh pemerintah Jepang melalui JICA di Indonesia diharapkan dapat menjalin hubungan yang baik. Lembaga kerjasama JICA telah ada di Indonesia sejak tahun 1974. Dalam merealisasikan bantuannya untuk membantu proses pembangunan negara-negara berkembang, JICA merumuskan program bantuannya yang kemudian disebut *Country Assistance Strategy.*

Country Assistance Strategy merupakan rumusan program prioritas yang diberikan oleh JICA kepada tiap-tiap negara penerima bantuan. Untuk Indonesia sendiri, bidang kerjasama yang menjadi prioritas JICA, diantaranya:

1. Kesinambungan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh sektor swasta
2. Menciptakan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan
3. Perdamaian dan stabilitas
4. Lingkungan

(Sumber: Bulletin JICA di Indonesia, hal. 11)

Dari ke-4 program yang menjadi bidang prioritas JICA di Indonesia, maka peneliti memfokuskan penelitian pada bidang Menciptakan Masyarakat yang

Demokratis dan Berkeadilan. Dimana hal tersebut merupakan salah satu faktor penting dalam suatu proses pembangunan selain itu juga sesuai dengan cita-citang bangsa Indonesia. Dalam menjalankan program tersebut, JICA membaginya kedalam beberapa hal misalnya saja bantuan terhadap peningkatan pendidikan dasar dan menengah, peningkatan pelayanan kesehatan dan medis, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta stabilitas penyediaan pangan.

Dalam upaya membantu meningkatan pendidikan Indonesia, pemerintah Jepang sendiri telah melaksanakan proyek kerjasama antara lain Program Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Regional atau *Regional Education Development and Improvement Program* (REDIP), Proyek Pendidikan Pengajar Matematika dan Sains Indonesia atau *Indonesia Mathematics and Science Teacher Education Project* (IMSTEP), dan Pelatihan Penguatan Pelayanan Pendidikan Bidang Matematika dan Sains di tingkat Sekolah Menengah Pertama *atau Streingthening In-Service Teacher Training of Mathematics and Science Teacher Education at Junior Secondary Level* (SISTTEMS). Kesemua program tersebut, memperoleh tanggapan yang sangat baik. Melihat keberhasilan yang telah dicapai, maka hal tersebut dijadikan sebagai landasan dibuatnya perencanaan dan pelaksanaan program PRIMA-P.

Program PRIMA-P dikhususkan pada Peningkatan Pendidikan Menengah Pertama. Program ini terfokus pada tiga prinsip sama seperti prinsip Dasar Kementrian Pendidikan Nasional yaitu: Desentralisasi, Manajemen Berbasis Sekolah dan Partisipasi Masyarakat. Bantuan JICA melalui PRIMA-P telah berjalan di Indonesia sejak bulan Desember tahun 2007.

Sebagaimana yang kita tahu, pendidikan merupakan hal yang penting dalam proses pembangunan suatu negara terlebih bagi negara berkembang seperti Indonesia maka dari itu, Indonesia menjadikan pendidikan sebagai salah satu prioritas utamanya seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 *"…mencerdaskan kehidupan bangsa…"*. Sumber daya manusia yang bermutu, yang berpendidikan, merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu negara. Dalam mewujudkan cita-cita bangsa, pada saat ini pemerintah Indonesia telah menetapkan kriteria kualitas pendidikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Sistem Pendidikan. Dalam peraturan pemerintah tersebut, pada pasal 1 kriteria mengenai kualitas pendidikan dilihat dari beberapa hal seperti standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian pendidikan.

Keseluruhan standar yang telah diuraikan diatas, dibuat oleh pemerintah dengan tujuan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di setiap tingkat pendidikan dari mulai tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta Sekolah Menengah Umum (SMU). Pada kenyataannya, kriteria mengenai kualitas pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh wilayah di Indonesia.

Ketidakmerataan pencapaian peningkatan pendidikan di beberapa provinsi di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :

a. Perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat
b. Perbedaan fasilitas pendidikan

c. Sebaran sekolah tidak merata

d. Nilai masuk sebuah sekolah dengan standar tinggi

e. Rayoniasi

(Riffai, 2011:37)

Menyadari akan hal tersebut pemerintah terus berupaya meningkatkan fasilitas pendidikan di seluruh sekolah, salah satunya yaitu dengan berusaha meningkatkan fasilitas penunjang pendidikan seperti pengadaan laboratorium serta komputer agar dapat meningkatkan kegiatan pendidikan di sekolah. Dengan melakukan upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendidikan di beberapa provinsi yang tingkat pendidikannya masih rendah dan salah satunya yaitu provinsi Sulawesi Selatan.

Provinsi Sulawesi Selatan terletak di bagian Selatan pulau Sulawesi. Propinsi ini beribukota di Makassar. Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk pada tahun 1960 dengan UU Nomor 47 Tahun 1960 tentang pembentukan daerah tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah yang mengesahkan terbentuknya Sulawesi Selatan dan Tenggara. Dan melalui UU Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, pemerintah memisahkan Sulawesi Tenggara dari Sulawesi Selatan. Pada tahun 2004, pemerintah memecah Sulawesi Selatan, berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki posisi yang strategis di Kawasan Timur Indonesia memungkinkan Sulawesi Selatan dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan, baik bagi Kawasan Timur Indonesia maupun untuk skala

internasional. Luas wilayah provinsi Sulawesi Selatan ialah 62.482,54 Km2 dengan jumlah penduduk 8.233.375 Jiwa (http://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan) (diakses tanggal 8 Maret 2010).

Dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sekitar delapan juta jiwa, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan target untuk tahun 2009, yaitu peningkatan pada tingkat pendidikan dasar, maka Rencana Pembangunan Daerah pun mengutamakan peningkatan pendidikan dasar dari segi pengembangan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian keperluan dasar dan perkembangan industri daerah. Ketimpangan pencapaian kualitas pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di provinsi Sulawesi Selatan dilihat dari beberapa hal yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 seperti dari segi standar isi, proses, tenaga pendidik, kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, pembiayaan serta pengelolaan yang masih minim. Sedangkan, nilai rata-rata Ujian Nasional telah mencapai angka yang lebih tinggi daripada standar nasional, maka pendidikan di provinsi Sulawesi Selatan perlu ditingkatkan lagi dengan membangun kerjasama antara masyarakat, sekolah, dan pengembangan administrasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan standar sistem pendidikan (http://www.jica.go.jp/english/sitemap/index.html) (diakses tanggal 17 Februari 2010).

Rendahnya kualitas pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terjadi di provinsi Sulawesi Selatan mendapat perhatian dari JICA dengan membuat program untuk SMP yang disebut program PRIMA Pendidikan

(PRIMA-P) yang fokuskan pada tiga kabupaten yaitu Kabupaten Barru, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Wajo dengan jangka waktu pelaksanaan selama 3 tahun yaitu mulai Desember 2007 sampai dengan November 2010 (http://www.jica.go.jp/english/contact/index.html) (diakses tanggal 17 Februari 2010).

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dengan JICA tidak terlepas dari adanya otonomi daerah. Sejak tahun 1999, pemerintah Indonesia mulai memberlakukan otonomi daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka pemerintah pusat memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk dapat membangun serta mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki. Otonomi daerah diartikan sebagai hak serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi daerah maka setiap daerah akan berupaya untuk dapat membenahi daerahnya, mengembangkan kemampuan yang dimiliki sehingga setiap daerah dapat ikut secara aktif dan produktif dalam membangun kerjasama dengan negara lain. Kerjasama yang terjalin dapat mempercepat pembangunan di daerah-daerah dengan begitu, dapat pula mempercepat pembangunan nasional.

Kerjasama yang terjalin di daerah bukan hanya kerjasama dalam bidang ekonomi, tetapi juga di dalam bidang kebudayaan serta bidang pendidikan. Dengan adanya otonomi daerah yang bertanggungjawab, dapat mempermudah birokrasi misalnya saja dalam pengaturan keuangan atau keseimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam UU No 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah

pada pasal 21 dijelaskan mengenai hak daerah dalam menjalankan otonominya salah satunya ialah mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Dan pada pasal 22 disebutkan pula apa saja yang menjadi kewajiban daerah dalam menjalankan otonominya salah satunya yaitu meningkatkan pelayanan pendidikan dasar. Kerjasama yang terjalain dalam bidang pendidikan seperti yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dengan pihak JICA, merupakan suatu upaya pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan otonomi daerah serta membangun daerahnya dari segi pendidikan (http://semende.wordpress.com/2007/06/23/kutipan-undang-undang-tentang-otonomi-daerah/) Diakses tanggal 27 April 2010.

Kondisi pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagian besar dinilai masih memiliki kekurangan dilihat dari segi sarana dan prasarana yang masih minim, proses pelaksanaan pembelajaran, kompetensi lulusan, serta dari segi pengelolaan kegiatan pendidikan. Kondisi tersebut tentu dapat menghambat pencapaian peningkatan kualitas pendidikan di provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari beberapa kabupaten dan salah satunya ialah kabupaten Barru.

Dengan melihat tiga prinsip pada program PRIMA Pendidikan yang dapat mendukung dalam meningkatkan kualitas pendidikan di kabupaten Barru provinsi Sulawesi Selatan, maka diharapkan kehadiran JICA dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di kabupaten Barru provinsi Sulawesi Selatan, dan diharapkan juga dapat membantu pemerintah Indonesia dalam meningkatan pendidikan pada tingkat nasional.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“ **Peranan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia”. *Studi Kasus: Kab. Barru – Provinsi Sulawesi Selatan (2007-2010)***

Ketertarikan penulis terhadap penelitian ini didukung oleh beberapa matakuliah pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, antara lain :

1. Pengantar Hubungan Internasional, mata kuliah ini membahas mengenai adanya interaksi antara aktor dalam pola hubungan internasional baik aktor itu merupakan suatu negara, organisasi internasional ataupun individu. Dalam penelitian ini terdapat suatu interaksi antara lembaga kerjasama dalam hal ini JICA dengan suatu negara dalam hal ini negara Indonesia.
2. Hubungan Internasional Asia Pasifik, inti dari mata kuliah ini yaitu menjelaskan pola hubungan internasional dilihat dari pemetaan secara letak geografis yang berada dalam satu kawasan lebih spesifik lagi yaitu kawasan Asia Pasifik. Dalam penelitian ini, baik negara Jepang ataupun negara Indonesia sama-sama berada pada kawasan Asia Pasifik sehingga memungkinkan terciptanya kerjasama bilateral diantara keduanya dan ini merupakan bagian dari penelitian.
3. Politik Luar Negeri, pembahasan pada mata kuliah ini yaitu mengenai bagaimana kebijakan suatu negara terhadap negara lain dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya serta mencapai kepentingan

negaranya dapat memberikan pengaruh terhadap negara lain. Dalam hal ini JICA dapat dikatakan sebagai salah satu alat dari kebijakan luar negeri dari pemerintah Jepang.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Untuk mengidentifikasi masalah tersebut, maka peneliti merangkumnya dalam beberapa pertanyaan :

1. Program apakah yang dilaksanakan oleh pihak *Japan International Cooperation Agency* dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh *Japan International Cooperation Agency* dalam merealisasikan program tersebut?
3. Upaya apakah yang dilakukan oleh pihak *Japan International Cooperation Agency* untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program tersebut?
4. Sejauhmana peranan *Japan International Cooperation Agency* dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan pada pemberian bantuan

teknis serta bantuan dana yang diberikan oleh *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dalam meningkatkan kualitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui program PRIMA Pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. Pembatasan waktu dilakukan karena program PRIMA-P yang dilaksanakan di Kabupaten Barru dimulai pada tahun 2007 dan berakhir pada tahun 2010 dan hanya difokuskan pada tingkat pendidikan SMP.

1.2.3 Perumusan Masalah

Untuk memudahkan penelitian yang didasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka penulis mengajukan perumusan masalah sebagai berikut :

"Sejauhmana peranan JICA dalam meningkatkan kualitas pendidikan di kabupaten Barru provinsi Sulawesi Selatan melalui program PRIMA-P ?"

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui program yang telah dilakukan oleh *Japan International Cooperation Agency* dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan di Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh *Japan International*

Cooperation Agency dalam merealisasikan programnya.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak *Japan International Cooperation Agency* dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program tersebut.
4. Untuk mengetahui Sejauhmana peranan *Japan International Cooperation Agency* dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan penelitian ini secara teoritis ialah dengan adanya penelitian ini diharapkan muncul pemikiran-pemikiran baru sesuai dengan apa yang telah dicapai. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hubungan internasional.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai pendidikan yang baik sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
3. Secara praktis hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran dan pengetahuan bagi berbagai pihak yang berminat atau yang sedang mangadakan penelitian mengenai peningkatan mutu pendidikan serta manajemen pendidikan.

1.4 Kerangka Pemikiran, Hipotesis dan Definisi Operasional

1.4.1 Kerangka Pemikiran

Pada awal kemunculannya Hubungan internasional merupakan interaksi dimana aktornya suatu negara dengan negara lainnya. Dalam perkembangannya hubungan internasional tidak terbatas hanya pada hubungan antar negara saja, tetapi juga merupakan hubungan antar individu dengan kelompok-kelompok kepentingan. Selanjutnya hubungan internasional didefinisikan sebagai berikut :

> ”Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar” (Perwita & Yani, 2006: 3-4).

Berdasarkan definisi mengenai hubungan internasional tersebut, maka ada yang di sebut dengan interaksi internasional. Bentuk-bentuk interaksi dapat dilihat melalui beberapa cara salah satunya ialah mengklasifikasikan pola interaksi dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak-pihak yang melakukan hubungan timbal balik, maka pola interaksi dibedakan menjadi pola kerjasama, persaingan, dan konflik (Perwita & Yani, 2006:42). Berdasarkan pola-pola tersebut, maka bentuk interaksi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang ialah pola kerjasama.

Kerjasama internasional terbentuk sebagai solusi atas munculnya berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional meliputi berbagai

bidang seperti ideology, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita & Yani, 2006:33-34)

Berdasarkan teori tersebut, maka interaksi antara pemeirntah Indonesia dengan pemerintah Jepang dikatakan sebagai interaksi dalam bentuk kerjasama internasional. Disebut demikian karena interaksi tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara dan melewati batas negara dimana secara letak geografisnya Indonesia dan Jepang berada di kawasan yang berbeda.

Dalam kerjasama internasional terdapat bentuk-bentuk kerjasama yaitu bentuk kerjasama bilateral, trilateral, multilateral serta bentuk kerjasama unilateral. Adapun perbedaan diantara bentuk kerjasama tersebut yaitu pada jumlah negara yang melakukan kerjasama. Kerjasama bilateral ialah kerjasama internasional yang dilakukan oleh dua negara dengan adanya kesepakat diantara dua negara tersebut. Sedangka pada kerjasama trilateral, multilateral dan unilateral, merupakan kerjasama internasional yang dilakukan oleh lebih dari dua negara.

Kerjasama bilateral dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan oleh dua negara dimana masing-masing negara memiliki kepentingan nasionalnya serta dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan negaranya. Secara lebih jelas lagi dalam buku “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional”, Perwita dan Yani mengartikan hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara dua pihak yang terlibat, dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral ini adalah negara (2006:33).

Kerjasama bilateral yang dilakukan oleh dua negara dapat dilakukan oleh

pemerintah secara langsung ataupun direpresentasikan oleh lambaga kerjasama sebagai kepanjangan pemerintah dari suatu negara seperti kerjasama bilateral yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah Jepang tidak secara langsung melakukan kesepakatan dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia tetapi di jalankan oleh suatu lembaga kerjasama yang dibentuk oleh pemerintah Jepang. Lembaga kerjasama yang dimaksud dalam hal ini ialah *Japan International Cooperation Agency* (JICA) yang merupakan :

> "Sebuah lembaga kerjasama internasional bagi pengembangan ekonomi dan sosial negara-negara berkembang yang dilaksanakan melalui bantuan bilateral antara pemerintah Jepang dengan negara penerima bantuan" (http://www.jica.go.jp/english/contact/index.html) (diakses tanggal 17 Februari 2010).

JICA merupakan suatu lembaga kerjasama yang dibentuk oleh pemerintah Jepang yang memiliki fungsi dalam memberikan bantuan berupa dana ataupun bantuan berupa teknis dalam proses pembangunan negara lain khususnya negara-negara berkembang kawasan Asia. Hingga saat ini telah banyak negara yang mendapat bantuan luar negeri dari negara Jepang melalui JICA. Bantuan luarnegeri yang diberikan secara bilateral memiliki ikatan politi yang lebih kuat daripada bantuan yang diberikan secara multilateral.

Secara umum bantuan luar negeri dapat didefinisikan sebagai transfer sumber daya dari satu pemerintah ke pemerintah lain yang dapat berbentuk barang atau dana. Bantuan luar negeri umumnya tidak ditujukan untuk kepentingan politik jangka pendek melainkan untuk prinsip-prinsip kemanusiaan atau pembangunan ekonomi jangka panjang. Program bantuan luar negeri ini biasanya menguntungkan kedua belah pihak (Perwita & Yani, 2006:81-83).

Holsti dalam buku “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional” karangan Perwita dan Yanyan membagi program bantuan luar negeri ke dalam empat jenis, yaitu :

1. Bantuan militer
2. Bantuan teknis
3. *Grant* dan program komoditi impor
4. Pinjaman pembangunan
   (2006:83)

Dari ke empat jenis bantuan yang dikemukakan oleh Holsti maka bantuan yang diberikan oleh pemerintah Jepang melalui JICA termasuk kedalam jenis bantuan teknis. Bantuan teknis merupakan bantuan yang berkaitan dengan pengetahuan serta keahlian. Bantuan tersebut berupa pengiriman personil dengan kualifikasi khusus dari negara industri kepada negara berkembang yang terbelakang, untuk memberikan arahan kepada berbagai proyek dengan maksud menyebarkan pengetahuan dan keahlian.

Bantuan teknis yang diberikan oleh JICA terhadap Indonesia ialah berupa pelatihan-pelatihan manajemen pendidikan yang baik bagi pengajar serta instansi terkait dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Segala macam bentuk bantuan yang telah diberikan oleh JICA terhadap Indonesia merupakan wujud nyata dari peranan JICA sebagai suatu lembaga kerjasama yang bertujuan untuk membantu pembangunan negara-negara di dunia khususnya negara-negara berkembang.

Secara umum peranan dapat dilihat sebagai tugas atau kewajiban atas suatu posisi sekaligus hak atas suatu posisi, peranan memiliki sifat saling tergantung. Peranan juga dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan

dari sesorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi di dalam suatu system. Suatu organisasi organisasi memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati bersama. Apabila struktur tersebut telah menjalankan fungsi-fungsinya, maka organisasi itu telah menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian peranan dapat dianggap sebagai fungsi dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan kemasyarakatan (Perwita & Yani, 2006: 30).

Bantuan yang diberikan oleh JICA terhadap Indonesia merupakan suatu bentuk nyata dari fungsinya sebagai lembaga kerjasama yang bertujuan untuk memberikan bantuan terhadap pembangunan negara-negara berkembang. Bantuan yang diberikan oleh JICA terhadap Indonesia lebih di fokuskan pada pembangunan masyarakat salah satunya ialah dengan membantu dalam hal peningkatan pendidikan di Indonesia. Definisi mengenai pendidikan dijelaskan oleh pemerintah dalam Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :

> "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,bangsa, dan negara" (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003).

Menurut Departemen Pendidikan Nasional, secara umum kualitas atau mutu adalah karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam mamuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan diwujudkan dengan

dibuatnya beberapa kriteria mengenai kualitas pendidikan.

Pendidikan yang berkualitas menurut Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 dapat dilihat dari beberapa hal seperti standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Hal-hal tersebut belum dicapai oleh seluruh wilayah Indonesia, maka untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Sulawesi Selatan bekerjasama dengan pemerintah Jepang melalui *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Dengan adanya bantuan dari JICA dalam bidang pendidikan tentu dapat meringankan tugas pemerintah dan diharapkan pendidikan di provinsi Sulawesi Selatan dapat lebih meningkat dan mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah.

Dalam merelisasikan bantuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan, JICA membuat suatu progam yang disebut program PRIMA-Pendidikan. Program PRIMA-Pendidikan ini difokuskan pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di provinsi Sulawesi Selatan dan dikhususkan pada tiga kabupaten yaitu kabupaten Barru, kabupaten Jeneponto, dan kabupaten Wajo. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya pada kabupaten Barru.

Program PRIMA-Pendidikan (PRIMA-P) menerapkan 2 metode yaitu *Regional Education Development and Improvement Program* (REDIP) serta *Lesson Study*. Metode REDIP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari segi isi atau ruang lingkup materi, tenaga pendidik, dan pengelolaan.

Sedangkan metode *Lesson Study* memiliki tujuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dari segi proses pembelajaran yang lebih baik, dengan begitu dapat meningkatkan kompetensi lulusan.

Bantuan dana yang diberikan oleh JICA juga memberikan peningkatan terhadap peningkatan sarana dan prasarana, serta dalam hal pembiayaan. Dengan adanya bantuan yang diberikan oleh JICA melalui program PRIMA-Pendidikan beberapa keberhasilan telah dicapai di kabupaten Barru diantaranya seperti meningkatnya isi atau ruang lingkup yang berkaitan dengan materi, proses pembelajaran, meningkatnya kompetensi lulusan, meningkatnya tenaga kependidikan, meningkatnya sarana dan prasarana, meningkatnya pengelolaan, serta dari segi pembiayaan.

1.4.2 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, penulis menarik sebuah hipotesis sebagai berikut :

"*Japan International Cooperation Agency* memiliki peranan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandai dengan meningkatnya kualitas pendidikan dalam hal isi atau ruang lingkup yang berkaitan dengan materi, proses pembelajaran, meningkatnya kompetensi lulusan, meningkatnya tenaga kependidikan, meningkatnya sarana dan prasarana, meningkatnya pengelolaan, serta dari segi pembiayaan"

1.4.3 Definisi Operasional

Sesuai dengan rumusan hipotesis diatas, maka terdapat beberapa definisi operasional yang berhubungan dengan hipotesis tersebut, diantaranya yaitu :

1. *Japan Internasional Cooperation Agency* merupakan suatu lembaga kerjasama yang dibentuk oleh pemerintah Jepang yang berfungsi sebagai penyalur bantuan secara bilateral baik itu bantuan yang berupa teknis, bantuan ODA Jepang serta bantuan Hibah.
2. Kualitas ialah pencapaian pendidikan yang lebih baik dengan didukung oleh faktor-faktor penunjang dalam proses pendidikan seperti sarana prasarana dan sumber daya lainnya.
3. Isi atau ruang lingkup materi dalam hal ini berkaitan dengan kesiapan materi yang diberikan seperti adanya silabus pembelajaran dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
4. Proses pembelajaran diartikan sebagai pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada tingkat pendidikan tertentu dalam penelitian ini yaitu kegiatan pembelajaran pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
5. Kompetensi lulusan merupakan kriteria atau kualifikasi tertentu yang harus dimiliki oleh peserta didik ketika lulus dari tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
6. Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang tenaga pendidik di setiap tingat pendidikan.
7. Sarana dan prasarana merupakan criteria minimal yang harus dimiliki oleh lembaga pendidikan dalam menunjang proses pembelajaran di setiap tingkat

pendidikan tertentu.

8. Pengelolaan dalam hal ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dalam kegiatan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
9. Pembiayaan merupakan pengaturan terhadap biaya bagi kegiatan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian analisis deskriptif. Metode penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang ada atau apa yang sudah ada. Menerangkan suatu masalah yang diteliti serta berupaya untuk menyampaikan fakta-fakta dengan jelas serta telititi. Penelitian dengan metode ini juga menggambarkan suatu proses mekanisme dan keterkaitan variable-variabel yang ada dalam situasi tertentu.

Pelaksanaan penelitian dengan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyususnan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti dari data tersebut. Dalam analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini, penelliti menggunakan deskriptif analitis yang bertujuan untuk mengetahui status dan mendeskripsikan aplikasi program yang berjalan di suatu negara berdasarkan data yang terkumpul. Dengan metode ini diharapkan peneliti dapat menggambarkan dan menelaah serta menganalisa fenomena yang ada untuk dituangkan ke dalam pembahasan yang bersifat ilmiah.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research)*. Dengan teknik ini, data-data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari dokumentasi dan publikasi. bentuk data-data tersebut dapat ditemui pada buku refrensi, jurnal, majalah atau laporan dari instansi terkait, disamping pemanfaatan sumber-sumber tulisan lainnya seperti pemanfaatan fasilitas dan jasa internet untuk mendapatkan data tertulis yang telah didokumentasikan.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dibeberapa perpustakaan serta instansi terkait guna mencari bahan serta data-data yang sesuai dengan penelitian, diantaranya :

1. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipati Ukur. Bandung.
2. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar. Bandung.
3. Perpustakaan FISIP Universitas Parahyangan, Jl. Ciumbuleuit. Bandung.
4. Perpustakaan FISIP Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Jatinangor. Sumedang.
5. JICA Indonesia, Sentral Senayan II, Lantai 14, Jl. Asia Afrika No.8 Gelora Bung Karno – Senayan Jakarta Pusat.
6. Departemen Pendidikan Nasional, Jl. Jend. Sudirman Senayan, Jakarta Pusat.
7. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Jl. Taman Suropati, Jakarta Pusat.

1.6.2 Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian yaitu dimulai sejak bulan Januari 2010 dan direncanakan selesai pada bulan Juli 2011 seperti yang dijelaskan dalam tabel.

Tabel 1.6.2
Tabel Waktu Penelitian

No	Aktivitas	Waktu penelitian											
		2010							2011				
		Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agts	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli
1	Pencarian data												
2	Pengajuan Judul												
3	Pembuatan Usulan Penelitian												
4	Seminar Usulan Penelitian												
5	Pengumpulan Data												
6	Penelitian												
7	Bimbingan Skripsi												
8	Rencana Sidang												

1.7 Sistematika Penulisan

Peneliti mencoba menjabarkan sistematika penulisan yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran yang terdiri dari kerangka konseptual

dan hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini peneliti menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan subjek yang diteliti, seperti Hubungan Internasional, Kerjasama Internasional, Hubungan Bilateral, Bantuan Luar Negeri, serta Pendidikan. Tinjauan pustaka ini dapat pula berisi uraian tentang data sekunder yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah atau hasil penelitian yang dapat dijadikan asumsi yang memungkinkan penalaran untuk menjawab masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

BAB III Objek Penelitian

Dalam bab ini peneliti menjelaskan gambaran umum tentang bagaimana pendidikan di Sulawesi Selatan. Menjelaskan gambaran umum mengenai JICA, yang terdiri dari latar belakang pembentukan, struktur organisasi dan keanggotaan; kerjasama yang dibangun antara JICA dengan Indonesia dalam meningkatkan pendidikan dan meliputi juga upaya-upaya yang ditempuh oleh keduanya.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini peneliti menjelaskan hasil dari program PRIMA-P yang dicanangkan oleh JICA di Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi juga upaya-upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dalam mendukung penuh program-program yang dicanangkan oleh JICA, serta bagaimana prospek peningkatan kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan setelah berakhirnya program PRIMA-P.

BAB V Penutup

Dalam bab ini peneliti menjelaskan isi skripsi yang berupa kesimpulan dan saran penelitian yang dilakukan, penolakan atau penerimaan hipotesis yang telah disusun sebelumnya. Kemudian akan diberikan saran-saran bagi peneliti lain yang berminat untuk melanjutkan atau mengoreksi penelitian ini.